

Aldegonda Evangeline Pelealu
Aksilas Dasfordate
Ngismatul Khoeriyah



Sejarah Indonesia

MASA KEMERDEKAAN

**Dari Proklamasi sampai Perjuangan
Kedaulatan dan Negara Kesatuan**





euraka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/TE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurakamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-516-054-2



9 786235 160542

**SEJARAH INDONESIA MASA
KEMERDEKAAN :
DARI PROKLAMASI SAMPAI
PERJUANGAN KEDAULATAN DAN
NEGARA KESATUAN**

**Aldegonda Evangeline Pelealu
Aksilas Dasfordate
Ngismatul Khoeriyah**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN :
DARI PROKLAMASI SAMPAI PERJUANGAN
KEDAULATAN DAN NEGARA KESATUAN**

Penulis : Aldegonda Evangeline Pelealu
Aksilas Dasfordate
Ngismatul Khoeriyah

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Bagus Haykal Fannani

ISBN : 978-623-516-054-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan : Dari Proklamasi Sampai Perjuangan Kedaulatan dan Negara Kesatuan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terbagi menjadi 4 bab yang membahas 1. Berbagai Peristiwa Sekitar Proklamasi, 2. Kondisi Kehidupan Awal Kemerdekaan, 3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, 4. Perjuangan Pengakuan Kedaulatan dan Kembali ke Negara Kesatuan

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 BERBAGAI PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI	1
A. Pendahuluan	1
B. Materi.....	3
1. Penyerahan Jepang Kepada Sekutu dan Kaitannya dengan Situasi Perjuangan Rakyat Indonesia.....	3
2. Peristiwa Rengasdengklok	15
3. Detik-detik Proklamasi	20
4. Sambutan Masyarakat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	23
C. Penutup	24
BAB 2 KONDISI KEHIDUPAN AWAL KEMERDEKAAN....	27
A. Pendahuluan	27
B. Materi.....	28
1. Kondisi dan Perkembangan Bidang Politik	28
2. Kondisi Ekonomi.....	47
C. Usaha-Usaha Mengatasi Kesulitan Ekonomi	52
D. Penutup	72
BAB 3 PERJUANGAN MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN	76
A. Pendahuluan	76
B. Materi.....	78
1. Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi.....	78
C. Penutup	107
BAB 4 PERJUANGAN PENGAKUAN KEDAULATAN DAN KEMBALI KE NEGARA KESATUAN	110
A. Pendahuluan	110
B. Materi.....	113
1. Situasi Politik dalam Negeri Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	113
2. Perjuangan Melalui Konperensi Meja Bundar....	117
3. Pembentukan RIS.....	122

4. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	126
C. Penutup	129
DAFTAR PUSTAKA	132
GLOSARIUM	134



**SEJARAH INDONESIA MASA
KEMERDEKAAN :
DARI PROKLAMASI SAMPAI
PERJUANGAN KEDAULATAN DAN
NEGARA KESATUAN**

**Aldegonda Evangeline Pelealu
Aksilas Dasfordate
Ngismatul Khoeriyah**



BAB

1

BERBAGAI PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI

A. Pendahuluan

Pertengahan tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik mulai terjepit. Jenderal Mac. Arthur, Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filipina mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat “loncat kataknya”. Satu per satu pulau-pulau antara Australia dan Jepang dapat direbut kembali. Pada bulan April 1944 Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun semakin terjepit. Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting karena jarak Saipan - Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA. Hal itu menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk. Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai janji kemerdekaan Indonesia.

Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan

BAB 2

KONDISI KEHIDUPAN AWAL KEMERDEKAAN

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa Kemerdekaannya adalah Sistem Presidensil. Sistem Pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undang-undang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. "Menteri merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada presiden". Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementerian. Seharusnya pembentukan kementerian diserahkan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan Departemen dan Susunan Kementerian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Kasman Singodimejo). Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah

BAB 3

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

A. Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan merupakan satu kemenangan bagi bangsa Indonesia, namun dalam perjalanan sejarah sementara pemerintah menata di bidang pemerintahan, pada bulan September pasukan Sekutu memasuki wilayah Indonesia. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Sekutu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Yang melaksanakan tugas ini adalah Komando Asia Tenggara (*South East Asia Command*) dibawah pimpinan Laksamana Lord Lois Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dibentuklah AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*).

Tugas AFNEI di bawah pimpinan Sir Philip Christison di Indonesia adalah : (1) menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, (2) membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, (3) melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan (4) menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil (5) menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang.

Pasukan-pasukan Sekutu yang mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 terdiri atas tiga divisi untuk Jawa Barat di pimpin oleh D.C. Hawthorn, Jawa Timur di pimpin Mansergh dan Sumatera di pimpin oleh Chambers, sedangkan

BAB 4

PERJUANGAN PENGAKUAN KEDAULATAN DAN KEMBALI KE NEGARA KESATUAN

A. Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan yang telah diumumkan tetapi bangsa Indonesia menghadapi masalah dengan kedatangan Sekutu dan turut serta NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia. Berbagai permasalahan terjadi antara Belanda dengan Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditempuh dengan cara militer dan diplomasi. Sebelum dilaksanakannya Konperensi Meja Bundar dilaksanakan Konperensi Antar Indonesia yang diikuti oleh Republik Indonesia dan negara-negara yang bentukan Belanda. Konperensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Setelah penandatanganan naskah KMB, terbentuklah RIS sebagai federasi yang terdiri dari RI dan BFO. Dalam perkembangan sejarah hanya dalam waktu 6 minggu nasib RIS tidak diganggu gugat. Setelah itu suara yang menghendaki kembali ke NKRI semakin meluas. Untuk kembali ke NKRI cukup dilakukan dengan mengubah konstitusinya saja. Jadi secara yuridis NKRI adalah perubahan dari RIS.

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik., 1950. *Riwayat Proklamasi Agustus 1945*. Jakarta.
- Alfian., 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia.
- Baharudin Lopa., 1962. *Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*
- Brata Trisnu Nugroho. 2006. *Prahara Reformasi Mei 1998*. Semarang: UPT UNNES Press, 2006.
- Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Tiara Wacana.
- Geoffrey B. Robinson. 2001. *Kudeta Angkatan Darat Teplok* Pressi.
- Ide Anak Agung Gde Agung., 1985. *Dari NIT ke RIS*. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Kahin G. Mc. T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca Cornell University.
- Kerusuhan Mei 1998; Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas: <http://semanggipeduli.com>
- Leirissa R. Z., 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Indonesia 1900-1950*. Akademica Presindo. Jakarta.
- Lembaga Analisa Informasi (LAI)., 2003. *Kontroversi SUPERSEMAR Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*. Media Presindo.
- Moedjanto G., 1993. *Indonesia Abad ke 21 Jilid I, II*. Kanisius Yogyakarta.
- Ricklefs M. C., 1981. *A History of Modern Indonesia*. The Mac Millan London.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Departemen Kebudayaan. Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo., 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Gramedia, Jakarta.

- Suhartono., 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo-Proklamasi 1908-1945*. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Tragedi Trisakti; Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas; <http://semanggipeduli.com>
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika pergerakan Kebangsaan Indonesia. Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wild, Colin dan Peter Carey (Peny.). 1986. *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

GLOSARIUM

- APRA : : Angkatan Perang Ratu Adil adalah kelompok milisi pro Belanda yang muncul di era revolusi nasional
- AFNEI : : *Allied Forces Netherlands East Indies* adalah badan yang dibentuk oleh Sekutu di Indonesia
- BPUPKI : : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk pada tanggal 29 April 1945, pembentukannya merupakan realisasi janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang
- BFO : : *Bijeenkomst Federale Overleg* adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung
- Committe of Good Offices* : : Badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang membawah kedua negara ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948
- de facto* : : Pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara
- de jure* : : Pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya

Exile Government	:	Biasa juga disebut dengan pemerintah pengasingan
Hiper-Inflasi	:	Inflasi yang terjadi secara cepat
IPPHOS	:	Indonesia Press Photo Service satu-satunya yang mengabadikan upacara Proklamasi Kemerdekaan didirikan oleh Alexius Impurung Mendur dan Frans Soemarno Mendur
Kaigun	:	Angkatan Laut Jepang
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
Komisi Tiga Negara	:	Beranggotakan negara pilihan Indonesia dan Belanda diantaranya Australia, Belgia dan Amerika Serikat
Komisi Arbitrase	:	Salah satu komisi alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan
KMB	:	Konperensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag Belanda 23 Agustus - 2 Nopember 1949 antara RI, Belanda dan BFO
Maklumat X	:	Maklumat X dikeluarkan oleh Hatta 16 Oktober 1945 yang memutuskan bahwa tugas KNIP berubah menjalankan tugasnya layak Dewan Perwakilan Rakyat

NICA	:	Netherlands Indies Civil Administration merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang melanjutkan tugas BPUPKI Panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai Ketua dan Drs. Mohamad Hatta wakil ketua
Perjanjian Renville	:	Perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 diatas kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang berlabuh di Jakarta
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional
Planning Board	:	Badan Perancang Ekonomi dibentuk 19 Januari 1947 tugasnya membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun

Perjanjian Linggarjati:	:	Perundingan antara Indonesia-Belanda yang menghasilkan status kemerdekaan Indonesia . Belanda mengakui secara de facto pulau Jawa, Madura dan Sumatera
Peta	:	Kesatuan militer yang dibentuk Jepang masa penudukan di Indonesia
RAPWI	:	<i>Relief of Allied Presoners of War and Internees</i>
Rikugun	:	Angkatan Darat Jepang
RIS	:	Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950
RMS	:	Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan 25 April 1950 pulau-pulu terbesarnya adalah Seram, Buru dan Ambon
Rule of Law	:	Prinsip hokum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hokum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual
SEAC	:	<i>South East Asia Command</i>
Trust	:	Kepercayaan

- UNCI : United Nations Commissions For Indonesia, komisi PBB untuk menyelesaikan konflik di Indonesia pengganti dari KTN
- UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization badan khusus yang didirikan PBB 1945
- Volksraad : Dewan rakyat adalah sebuah lembaga penasehat bagi gubernur jenderal Hindia Belanda, Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintah Hindia Belanda
- Van Mook : Hubertus Johannes van Mook adalah Gubernur Jenderal Hindi Belanda secara de facto yang terakhir yang menjabat setelah Jepang menguasai Indonesia
- Vacuum of Power : Kekosongan dalam pemerintahan, itu pernah terjadi di Indonesia saat Jepang kalah dengan Sekutu menjelang kemerdekaan